



Published every April, August and December

JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman

Boni Saputra¹, Riki Fernando²

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM, Yogyakarta¹
Magister Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNP, Padang², Indonesia

Abstract. *This research aims to analyze the contribution of the sources of Pendapatan Asli Daerah in supporting the regional financial independence. The research conducted at the Office of Regional Finance and Asset Agency (BKAD) at Sleman Regency. This research uses quantitative descriptive method. Data collection techniques through observation, and documentation studies. The data used on this research was secondary data that is the realization report of APBD period 2012-2016. The results show that the trend of PAD growth experienced an average growth of 25%. Where from sources of PAD that contribute greatly to total PAD comes from local taxes with an average contribution of 59.11%. The financial performance of Sleman Regency is low based on financial ratios. Where the ratio of degrees of decentralization is in the medium the category of 26.34%. The dependency ratio is very high with an average value of 67.78%. The ratio of independence is low or shows the pattern of consultative relationship with an average of 38.86%. As for the ratio of the effectiveness of local revenue is classified as very effective and the ratio of efficiency of local revenue in the category inefficient.*

Keywords: *center contribution of PAD; growing of PAD; regional financial independence; regional financial performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Penelitian berlangsung di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan realisasi APBD periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tren pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25%. Dimana dari sumber-sumber PAD yang sangat berkontribusi terhadap total PAD berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 59,11%. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tergolong rendah berdasarkan rasio keuangan. Dimana rasio derajat desentralisasi berada dalam kategori sedang yaitu 26,34%. Rasio ketergantungan sangat tinggi dengan nilai rata-rata 67,78%. Rasio kemandirian tergolong rendah atau menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan rata-rata 38,86%. Sementara untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah dengan kategori tidak efisien.

Kata Kunci: kemandirian keuangan daerah; kinerja keuangan daerah; kontribusi sumber-sumber PAD; pertumbuhan PAD.

Corresponding author. Email. bonisaputra66@yahoo.co.id¹, fernandoriki_92@yahoo.co.id²

How to cite this article. Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(3), 1515–1534. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9215>

History of article. Received: September 2017, Revision: November 2017, Published: Desember 2017

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i3.9215

Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Sehingga, dengan skema tersebut, harapannya daerah dapat meminimalisir tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah khususnya dalam hal kemandirian keuangan di banyak daerah khususnya di Indonesia masih belum dapat terselenggara secara optimal. Berbagi persoalan yang ikut serta mengiringi desentralisasi fiskal justru membuat kecenderungan daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat. Padahal, dewasa ini desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat telah memberikan kewenangan secara leluasa kepada pemerintah daerah untuk berkreasi menggali sumber-sumber keuangan yang terdapat di wilayah administratif daerah baik dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah. Sejalan dengan hal tersebut, E. Koswara (2000: 51-52) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Kinerja keuangan daerah atau

kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Halim (2012) berpendapat bahwa bentuk atau output dari penilaian kinerja keuangan daerah adalah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah yang berupa perhitungan APBD. Melalui laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah, maka dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Guna menjamin terwujudnya otonomi daerah khususnya dalam bidang keuangan daerah yang semakin baik, maka pemerintah juga mengeluarkan regulasi dalam bentuk Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya peraturan pengelolaan daerah secara mandiri, mengakibatkan adanya tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan secara transparan dalam pengelolaan anggaran kepada publik. Hal inilah yang mendasarkan perlunya pelaksanaan *value of money* di pemerintah daerah. Adanya regulasi tersebut juga secara signifikan telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam bidang keuangan daerah.

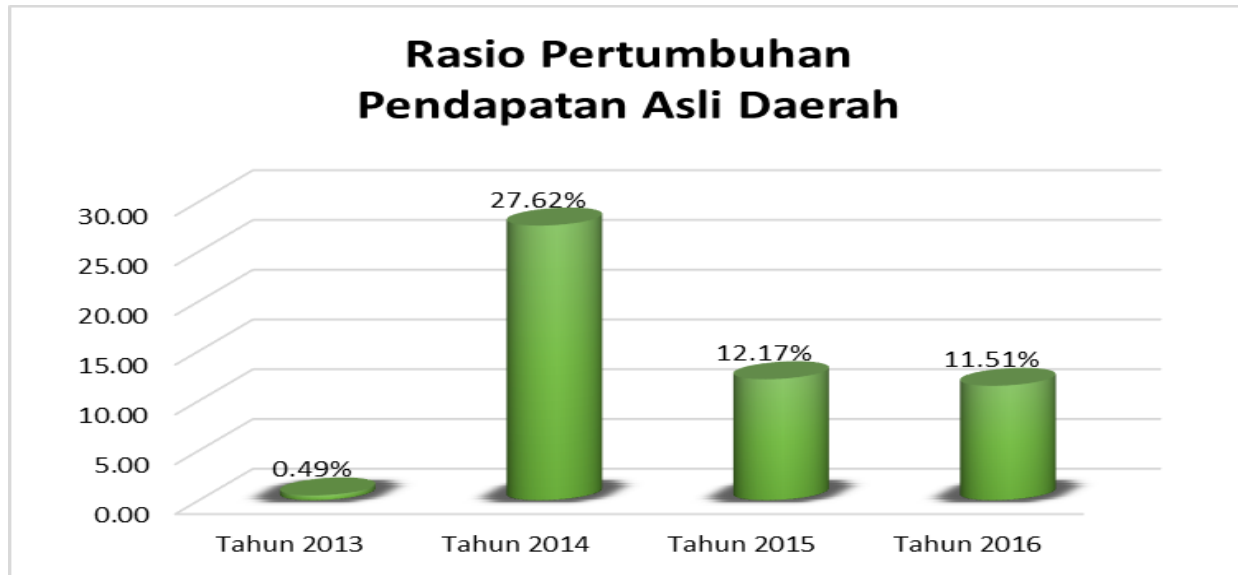
Daerah dalam meningkatkan kemandirian diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan upaya peningkatan PAD melalui inovasi, dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan mengali sumber PAD yang baru sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi

masyarakat. Karena semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

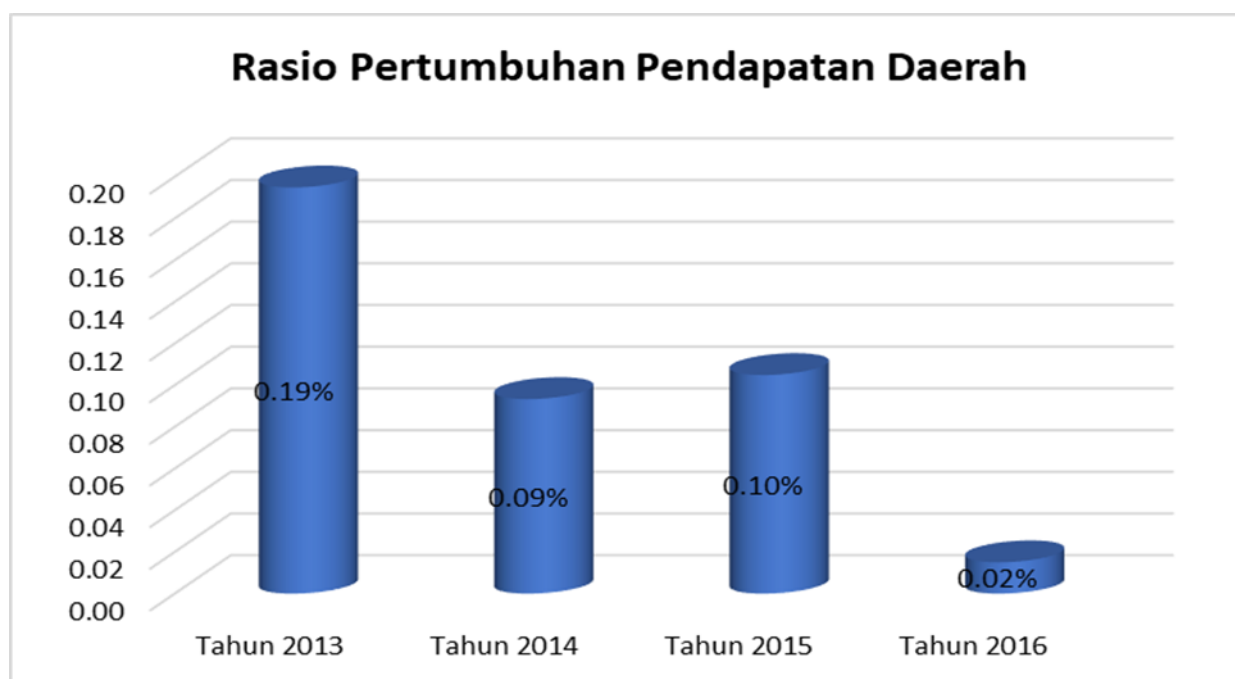
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi tujuan utama pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pada tiap-tiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah bisa mengembangkan dan memanfaatkan potensi kekayaan yang dimiliki semaksimal mungkin. Sebagai upaya memaksimalkan wewenang kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan potensi daerah yang dimiliki melalui Pendapatan Asli Daerah. Lebih jauh, Ritonga (2014) menjelaskan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD suatu daerah terhadap total pendapatan, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk

menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta untuk prioritas pembangunan daerah. Kondisi seperti ini tidak tertutup kemungkinan juga harus dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Sleman dalam upaya menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki agar daerah mampu untuk lebih mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini selalu berusaha untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah (PD), khususnya melalui pendapatan asli daerah guna agar target dalam anggaran bisa terlampaui. Pendapatan Asli Daerah Sleman dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun dalam sisi realisasi (lihat tabel 10). Namun, jika dilihat dari rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan PD Kabupaten Sleman dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan. Seperti yang terlihat pada diagram 1 dan 2 di bawah ini:



Gambar 1. Rasio Pertumbuhan PAD Kab. Sleman Tahun 2013-2016



Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Gambar 2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab. Sleman Tahun 2013-2016

Dari grafik gambar 1 dan gambar 2 dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sleman cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun khususnya periode 2013-2016. Untuk pertumbuhan PAD rasio pertumbuhannya mengalami kenaikan secara drastis yang terjadi pada tahun 2013 ketahun 2014, akan tetapi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 rasio pertumbuhan PAD mengalami penurunan. Sementara untuk pertumbuhan pendapatan total daerah rasio pertumbuhannya tidak stabil yaitu terjadi penurunan pada tahun 2013 ke tahun 2014, dan naik pada tahun 2014-2015, dan pada tahun 2016 rasio pertumbuhan pendapatan daerah turun secara signifikan. Dari data ini tentunya dapat diasumsikan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sleman masih dirasa belum optimal dan butuh upaya lagi untuk meningkatkan rasio pertumbuhan keuangan daerahnya tersebut. Berdasarkan data dan latar belakang di atas, sehingga dirasa perlu untuk

dilakukannya penelitian dengan tujuan untuk menganalisis kontribusi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian keuangan daerah di era desentralisasi fiskal dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyajian laporan keuangan serta kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sleman.

KAJIAN LITERATUR

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Setiap kemampuan keuangan daerah merupakan gambaran dan interaksi antara kemampuan penyediaan pendapatan dan penggunaannya dapat tercermin pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Kinerja keuangan daerah dikatakan baik apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan untuk

membayai pengeluaran daerahnya, dimana pontesi PAD merupakan indikator pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, di danai dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan target pendapatan, juga haruslah diimbangi dengan peningkatan jumlah realisasi atas target yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-undang Nomor 33 pasal 1 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing daerah yang pungutannya diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara Halim (2004) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2004) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah bisa dikategorikan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2004:67).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang berasal dari daerahnya masing-masing yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang Sah. PAD merupakan pendapatan yang sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dan menjadi

sumber pembiayaan dalam menjalankan otonomi daerah.

2.2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Menurut Mahmudi (2010) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD Pn} = \frac{\text{PAD Pn} - \text{PAD Pn} - 1}{\text{PAD Pn} - 1} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Keterangan: Pn = Tahun yang Dihitung
Pn-1 = Tahun Sebelumnya

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2014) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Untuk melihat pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman selama

periode lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

Tahun	Total PAD Tahun Dihitung	Total PAD Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan PAD (%)
2012	301,069,539,284	-	-
2013	449,270,304,869	301,069,539,284	49.22
2014	573,337,599,560	449,270,304,869	27.62
2015	643,130,079,823	573,337,599,560	12.17
2016	717,151,176,028	643,130,079,823	11.51
Rata-rata	595,722,290,070	491,701,880,884	21.16

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman mempunyai kecenderungan turun dari tahun ke tahun. Penurunan secara drastis terlihat tahun 2014 ke tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata diperoleh nilai 21.16% terlihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan PAD berada di atas rata-rata, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 pertumbuhan PAD berada di bawah rata-rata selama lima tahun terakhir.

2.1. Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi yang dimaksud di sini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh sumber-sumber dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang terhadap total PAD itu sendiri dan terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran. Besarnya kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing sumber PAD tersebut. Untuk lebih jelasnya gambaran

mengenai kontribusi sumber-sumber PAD dapat dilihat pada rumus berikut:

Kontribusi Sumber – sumber PAD =

$$\frac{\text{Sumber – sumber PAD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.2. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan adalah salah satu cara untuk membuat perbandingan data keuangan, sebagai dasar untuk mengetahui kinerja keuangan suatu lembaga dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2004). Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Erich Helfert (2000) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, sedangkan Slamet Munawir (1995:64) menjelaskan rasio sebagai hubungan atau

perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain.

Penggunaan analisis rasio keuangan desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur kinerja keuangan atau kemampuan keuangan daerah dengan cara menghitung rasio-rasio keuangan. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan (Bisma, 2010:77). Sedangkan menurut Halim (2004) mengatakan bahwa: beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antar lain Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio efektivitas dan efisiensi, *Debt Service Ratio*. Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan yang dapat dibuat menurut Mahmudi (2010: 142) yaitu: Derajat Desentralisasi; Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah; Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; Rasio Efektivitas PAD; dan Rasio Efisiensi PAD.

a) Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dimaksudkan

untuk mengukur tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuai potensi daerah terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Untuk mengetahui rasio derajat desentralisasi, maka digunakan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal yang dirilis oleh Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010), dengan asumsi ketika persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah semakin tinggi, maka sangat baik kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya jika persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah kecil, maka tingkat desentralisasi fiskal daerah sangat kurang.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD Terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Baik
≥ 50.01	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010)

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah

pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau

pemerintahan provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total PD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Untuk mengetahui derajat kemandirian keuangan daerah, maka digunakan kriteria

penilaian ketergantungan keuangan daerah. Dengan asumsi, semakin besar Persentase PAD terhadap Dana perimbangan maka kondisi kemandirian keuangan daerah semakin baik, sebaliknya semakin kecil Persentase PAD terhadap dana perimbangan maka kemandirian keuangan daerah semakin buruk criteria ketergantungan menurut Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010), sebagaimana tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Dana Perimbangan	Ketergantungan Keuangan Daerah
0.00 – 10.00	Sangat Rendah
10.01 – 20.00	Rendah
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Tinggi
≥ 50.01	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Bisma, 2010)

c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Formula

untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Halim, 2004) memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a) Pola Hubungan Instrukturif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah

- yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - c) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- d) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

d) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas pendapatan daerah (PAD) adalah sebuah alur kerja yang secara spesifik mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk berkreasi pada upaya memobilisasi segenap perangkat di daerah dalam hal mencapai target penerimaan PAD, sesuai dengan standar yang telah ditentukan di awal tahun anggaran berjalan sebagai kerangka

dasar dalam hal pemenuhan pos PAD di berbagai sektor yang terdapat di daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PAD =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Untuk mengukur tingkat efektivitas pendapatan asli daerah digunakan kategori penilaian dengan mengacu pada hasil perhitungan rasio efektifitas. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90 - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

e) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kadar pengeluaran pemerintah daerah dalam memenuhi target PAD. Variabel efisiensi sangat penting sebagai salah satu analisis rasio

keuangan daerah karena perannya yang cukup sentral. Untuk menghitung tingkat efisiensi, maka dapat diketahui semakin kecil angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin efisien. Sebaliknya semakin besar angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin tidak efisien. Rasio efisiensi dapat dihitung dengan formula berikut ini:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2010)

Tabel 6. Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

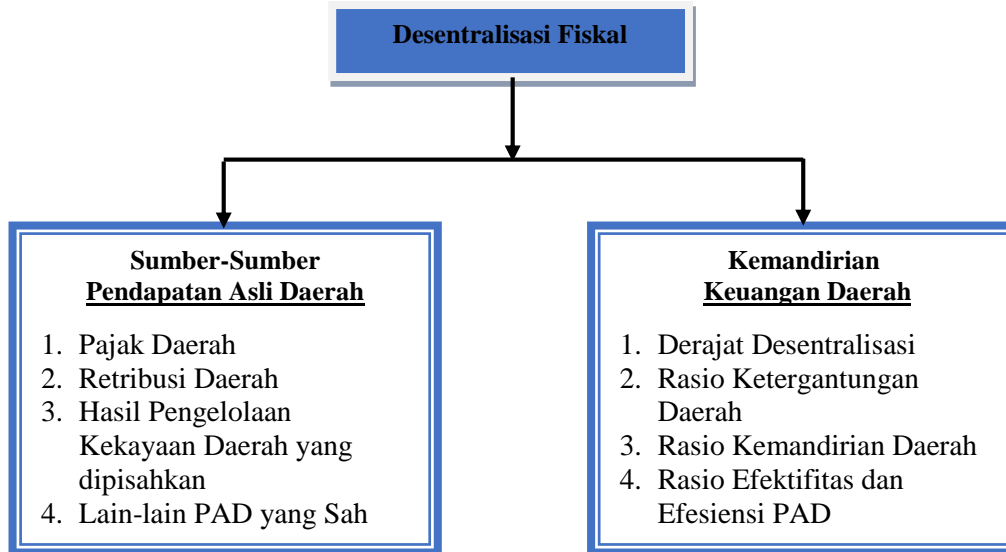
Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efisiensi
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2010)

2.1.Kerangka Pemikiran

Kemandirian keuangan daerah di era desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber PAD dalam wilayah administratif daerah yang bersangkutan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dengan semakin

luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tentu saja menuntut kualitas dan inovasi pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber PAD, artinya bahwa pemerintah daerah harus dapat memenuhi kemampuan keuangan terutama yang berasal dari PAD. Berikut hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. Tipe deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami fenomena yang terjadi, yang pada akhirnya memberikan pemahaman dan informasi yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan studi dokumentasi/kepuustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan realisasi APBD dan laporan biaya pemungutan pajak daerah dan kontribusi daerah pemerintah Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir periode 2012-2016. Data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD dan kinerja keuangan daerah, melalui analisis rasio keuangan. Meliputi, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas dan efisiensi PAD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam peyelenggaraan otonomi secara luas, pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dibidang finansial agar dapat mencukupi sendiri belanja rumah tangganya yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang potensial yang dimiliki oleh daerah agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat diperkecil atau dihilangkan, oleh karena itu perlu untuk menganalisis keadaan pendapatan asli daerah, menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah serta mengidentifikasi potensi pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Sleman DIY.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah dan kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD dan kinerja keuangan daerah, melalui analisis rasio keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2012-2016. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

4.1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah, bermanfaat guna mengetahui apakah selama tahun anggaran 2012-2016, pertumbuhan PAD di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan secara positif atau

negatif. Tentu harapannya pertumbuhan PAD harus secara positif dan kecendrungan trend meningkat tiap tahun anggaran. Untuk mengetahui trend pertumbuhan PAD menurut sumber-sumbernya di Kabupaten Sleman selama periode analisis dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Pertumbuhan PAD Berdasarkan Sumber-Sumber PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016

Sumber-sumber PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Total PAD
2013	96,793,085,350	13,966,709,943	2,768,407,437	34,672,562,851	148,200,765,581
2014	51,405,039,736	-5,369,480,949	8,103,372,356	-102,984,767,905	124,067,294,696
2015	47,103,772,834	2,420,008,245	10,675,696,812	182,506,133,833	69,792,480,266
2016	10,262,231,930	-2,705,157,086	7,462,767,621	-9,308,007,136	5,711,835,329
Rata-rata	51,391,032,463	2,078,020,038	7,252,561,057	26,221,480,411	86,943,093,968
Prosentase	59.11%	2.39%	8.34%	30.16%	25.00%

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Selama periode pengamatan, PAD Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25%. Pertumbuhan rata-rata terbesar yaitu berasal dari Pajak Daerah sebesar 59,11%, selanjutnya diikuti oleh Lain-lain PAD yang sah sebesar 30,16%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8,34%, serta pertumbuhan rata-rata terkecil adalah retribusi daerah sebesar 2,39%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata dari sumber-sumber PAD Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan positif, sedangkan pertumbuhan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih kurang memadai karena masih di bawah laju pertumbuhan rata-rata PAD secara keseluruhan. Sehingga dari kedua sumber ini perlu dicari penyebab terjadi penurunannya guna di tingkatkan pertumbuhannya pada periode yang akan datang. Sementara untuk pertumbuhan rata-rata PAD selama tahun

anggaran 2012-2016, pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah menunjukkan bahwa kedua sumber PAD ini pertumbuhannya positif dan di atas laju pertumbuhan rata-rata PAD secara keseluruhan, sehingga kedua sumber ini memiliki prospek untuk terus dioptimalkan pada periode-periode yang akan datang, khususnya dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

4.2. Kontribusi Sumber-Sumber PAD

Kontribusi yang dimaksud di sini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh sumber-sumber PAD terhadap besarnya jumlah PAD. Besarnya kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing sumber PAD tersebut. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai kontribusi sumber-sumber PAD tersebut dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Kontribusi Sumber-Sumber PAD Terhadap Total PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 (dalam Rupiah)

Sumber-sumber PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Total PAD
2012	177,835,870,150	34,034,969,787	12,783,121,935	76,415,577,410	301,069,539,282
2013	274,628,955,500	48,001,679,730	15,551,529,372	111,088,140,261	449,270,304,863
2014	326,033,995,236	42,632,198,781	23,654,901,728	181,016,503,814	573,337,599,559
2015	373,137,768,070	45,052,207,026	34,330,598,540	190,609,506,189	643,130,079,825
2016	383,400,000,000	42,347,049,940	41,793,366,161	181,301,499,053	648,841,915,154
Rata-rata	307,007,317,791	42,413,621,053	25,622,703,547	648,841,915,154	523,129,887,737

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Tabel 9. Kontribusi Sumber-sumber PAD Terhadap Total PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016 (dalam Persen)

Sumber-sumber PAD	Pajak daerah	Retribusi daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2012	59.07%	11.30%	4.25%	25.38%
2013	61.13%	10.68%	3.46%	24.73%
2014	56.87%	7.44%	4.13%	31.57%
2015	58.02%	7.01%	5.34%	29.64%
2016	59.09%	6.53%	6.44%	27.94%
Rata-rata	58.83%	8.59%	4.72%	27.85%

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Kabupaten Sleman elemen PAD yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD sejak tahun anggaran 2012-2016 adalah bersumber dari pajak daerah sebesar 58,83% kemudian diikuti oleh lain-lain PAD yang sah 27,85%, urutan ketiga retribusi daerah sebesar 8,59% dan yang paling terkecil adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kontribusi rata-rata sebesar 4,72%. Secara umum kontribusi Pajak Daerah, merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan pendapatan di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 307,007,317,791. Jika kita lihat pertumbuhan total PAD secara keseluruhan maka terlihat

bahwa keuangan daerah melalui PAD terus menunjukkan kenaikan mulai dari tahun 2012 sebesar 301,069,539,282 sampai tahun 2016 yang mencapai nilai 648,841,915,154.

4.3. Analisis Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2004). Selain itu, dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah

lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Analisis rasio keuangan adalah suatu proses yang mengidentifikasi ciri-ciri yang penting tentang keadaan keuangan dan kegiatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Untuk dapat mengetahui kemampuan kinerja keuangan Kabupaten Sleman dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal khususnya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah maka dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan seperti berikut ini:

a) Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keadilan pembagian sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuai potensi daerah terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerinah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. PAD merupakan aspek yang dangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tabel 10. Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Sleman Periode 2012-2016

Tahun	Total PAD	Total PD	Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
	1	2	$1/2*100$	
2012	301,069,539,284	1,589,722,974,409	18.94%	Kurang
2013	449,270,304,869	1,899,525,636,838	23.65%	Sedang
2014	573,337,599,560	2,076,820,131,084	27.61%	Sedang
2015	643,130,079,823	2,294,622,764,756	28.03%	Sedang
2016	717,151,176,028	2,329,097,456,006	30.79%	Cukup
Rata-rata	536,791,739,913	2,037,957,792,619	26.34%	Sedang

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Dari tabel 10 di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa derajat desentralisasi fiskal pada Kabupaten Sleman berada pada derajat desentralisasi kategori sedang. Alasannya, karena rasio rata-rata untuk lima tahun anggaran di Kabupaten Sleman, Persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih berada di bawah rasio 26,34%. Tahun 2012 merupakan tahun

dengan derajat desentralisasi terbaik yaitu dengan kategori kurang dengan nilai 18,94% di bawah rata-rata secara keseluruhan, sedangkan untuk tahun 2014 dan 2015 tahun ini merupakan dalam kategori cukup namun nilai rata-rata di atas dari nilai rata-rata keseluruhan.

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah salah satu dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan disuatu daerah. Rasio ketergantungan keuangan diperoleh dengan membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Asumsinya, ketika prosentase rasio ketergantungan keuangan daerah semakin tinggi maka imbasnya pada tingkat ketergantungan daerah juga akan semakin besar dan sebaliknya, ketika ketergantungan keuangan daerah semakin

rendah, tingkat ketergantungan daerah akan lebih kecil. Ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan daerah pada distribusi keuangan dari pemerintah pusat dan atau pada pemerintah provinsi dalam hal pembiayaan baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan pelayanan. Untuk melihat rasio ketergantungan keuangan di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Sleman Periode 2012-2016

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total PAD	Rasio Ketergantungan	Tingkat Ketergantungan
	1	2	1/2*100	
2012	1,281,708,216,150	1,589,722,974,409	80.62%	Sangat Tinggi
2013	1,442,483,146,251	1,899,525,636,838	75.94%	Sangat Tinggi
2014	1,499,148,394,633	2,076,820,131,084	72.18%	Sangat Tinggi
2015	1,080,162,444,931	2,294,622,764,756	47.07%	Tinggi
2016	1,602,998,761,228	2,329,097,456,006	68.82%	Sangat Tinggi
Rata-rata	1,381,300,192,639	2,037,957,792,619	67.78%	Sangat Tinggi

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Dengan memperhatikan hasil perhitungan dari rasio ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sleman, kecenderungan kondisi keuangan untuk lima tahun terakhir sangat tinggi dengan presentasi mencapai angka rata-rata 67,78% untuk rasio ketergantungan daerah. Terhitung sejak tahun 2012 rasio ketergantungan keuangan sudah mencapai 80,62% dan terus mengalami penurunan ditahun berikutnya yaitu tahun 2016. Pada tahun 2015 rasio ketergantungan mengalami kenaikan dari angka 47,07% menjadi sebesar 68,82% pada tahun 2016.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa rasio ketergantungan di lima tahun terakhir terus mengalami tren positif dengan semakin berkurangnya prosentase ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap sumber pendapatan daerah dari pendapatan transfer, khususnya dari tahun

2012 hingga 2015. Transisi dari tahun 2015 ke 2016 yang sempat mengubah tren penerunan ketergantungan keuangan daerah dari pendapatan transfer yang awalnya 47,07% di tahun 2015 menjadi lebih tinggi di tahun 2016 yaitu 68,82%. Hasil ini menunjukkan angka ketergantungan keuangan daerah yang di alami oleh Kabupaten Sleman yang masih sangat tinggi, jika di rata-ratakan besaran ketergantungan keuangan daerah secara keseluruhan selama lima tahun terakhir.

Kondisi ini belum menunjukkan Kabupaten Sleman masih sangat tinggi tingkat bergantung terhadap dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi sehingga ini merupakan satu persoalan yang harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah Sleman untuk dapat lebih lagi agresif dalam memanfaatkan dan menggali sumber-sumber dan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

c) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD adalah salah satu aspek yang paling penting berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah dimana kemampuan daerah secara otonomi untuk mengelola dan menggali sumber-sumber PAD sehingga dapat menambah keuangan daerah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka digunakan

rasio kemandirian diperoleh dari hasil perbandingan antara pendapatan asli daerah yang dibagi dengan beberapa sumber dana untuk pembiayaan yang terdapat di daerah seperti besaran dana transfer dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi serta besaran nominal pinjaman daerah. Kedua pendapatan dari transfer (pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) dan serta pinjaman daerah di kalukulasi menjadi satu, sehingga di peroleh satu kalkulasi hitungan secara makro. Besaran hitungan kalkulasi makro ini selanjutnya menjadi pembanding dari besaran pendapatan asli daerah, hasilnya baru berupa rasio kemandirian daerah.

Tabel 12. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Sleman Periode 2012-2016

Tahun Anggaran	Total PAD	Dana Perimbangan/Transfer	Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian
	1	2	1/2*100	
2012	301,069,539,284	1,281,708,216,150	23.49%	Rendah Sekali/Instruktif
2013	449,270,304,869	1,442,483,146,251	31.15%	Rendah/Konsultatif
2014	573,337,599,560	1,499,148,394,633	38.24%	Rendah/Konsultatif
2015	643,130,079,823	1,080,162,444,931	59.54%	Sedang/Partisipatif
2016	717,151,176,028	1,602,998,761,228	44.74%	Rendah/Konsultatif
Rata-rata	536,791,739,913	1,381,300,192,639	38.86%	Rendah/Konsultatif

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di atas telah diperoleh besaran rasio untuk lima tahun terakhir, yaitu sebesar 38,86% dengan kategori rendah atau Konsultatif. Pola Hubungan Konsultatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Capaian ini tidak terlepas dari keadaan keuangan di daerah Kabupaten Sleman yang masih banyak bertumpu pada dana perimbangan baik dari provinsi maupun dari pusat melalui transfer pusat dan provinsi. Bahkan di tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2014, hampir keseluruhan pendapatan daerah sepenuhnya bersumber dari

dana transfer pusat dan provinsi. Situasi ini yang membuat otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan masih sulit tercapai di Kabupaten Sleman.

d) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan daerah adalah sebuah alur kerja yang secara spesifik mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk berkreasi pada upaya memobilisasi segenap perangkat di daerah dalam hal mencapai target penerimaan PAD. Sesuai dengan standar yang telah ditentukan di awal tahun anggaran berjalan sebagai kerangka dasar dalam hal pemenuhan pos-pos PAD di

berbagai sektor yang terdapat di daerah. Rasio efektifitas PAD secara umum di peroleh dengan format perhitungan yang paling tidak

akan menyinggung dua aspek, yaitu realisasi pendapatan asli daerah dan target atau capaian penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 13. Rasio Efektivitas PAD Kab. Sleman Periode 2012-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Nilai Efektivitas
	1	2	1/2*100	
2012	301,069,539,284	241,003,081,720	124.92%	Sangat Efektif
2013	449,270,304,869	342,895,307,197	131.02%	Sangat Efektif
2014	573,337,599,560	474,917,917,941	120.72%	Sangat Efektif
2015	643,130,079,823	577,585,009,141	111.35%	Sangat Efektif
2016	717,151,176,028	648,841,915,155	110.53%	Sangat Efektif
Rata-rata	536,791,739,913	457,048,646,231	117.45%	Sangat Efektif

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Dari hasil perhitungan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman disimpulkan sangat efektif. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian tingkat efektifitas pendapatan asli daerah yang menempatkan Kabupaten Sleman dengan nilai rata-rata efektifitas 117,45%. Jika dilihat lebih spesifik dengan mengacu pada tingkat efektifitas di setiap tahun anggaran yang berjalan, secara umum rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tidak bervariasi atau sama dengan predikat sangat efektif. Rasio efektifitas terbaik yaitu berada pada tahun 2012-2014 karena di atas rata-rata rasio efektifitas secara keseluruhan >117,45%. Sementara pada tahun 2015-2016 nilai rasio efektifitas berada di bawah nilai rata-rata.

e) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tingkat efisiensi pendapatan asli daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kadar pengeluaran pemerintah daerah dalam memenuhi target PAD. Variabel efisiensi sangat penting sebagai salah satu analisis rasio keuangan daerah karena perannya yang cukup sentral, yaitu

menghitung tingkat efisiensi, maka dapat diketahui semakin kecil angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin efisien. Sebaliknya semakin besar angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin tidak efisien.

Pada prakteknya, sering sekali realisasi pendapatan asli daerah sudah sangat bagus dengan tingkat efektifitas yang sangat tinggi, tetapi aspek yang terlupakan adalah aspek efisien yang melekat pada kegiatan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa setiap kegiatan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menarik pajak atau retribusi di bebaskan pada anggaran di PAD, sehingga selain berbicara soal efektifitas domain yang juga tidak kalah menariknya untuk di lirik adalah efisiensi termasuk efisiensi anggaran. Proporsional antara efektifitas dan efisiensi secara ideal harusnya berjalan secara berlawanan. Jika tingkat efektifitas PAD tinggi, maka semestinya tingkat efisiensi akan semakin rendah. Proporsional ini baru menunjukkan siklus anggaran pada suatu daerah dapat berjalan secara sehat.

Untuk menghitung rasio efisiensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman diperlukan dua variabel pembanding. Pertama biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal usahanya menarik pajak di daerah,

kedua besaran realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Semakin kecil nilai yang diperoleh dari hasil bagi antara biaya perolehan dengan realisasi penerimaan maka rasio kinerja pemerintah daerah semakin

efektif, sebaliknya jika hasil bagi (rasio efisiensi) semakin besar, maka kinerja pemerintah daerah juga semakin tidak efisien.

Tabel 14. Rasio Efisiensi PAD Kab. Sleman Periode 2012-2016

Tahun Anggaran	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi	Nilai Efisiensi
	1	2	$1/2*100$	
2012	179,849,078,327	301,069,539,284	59.74	Tidak Efisien
2013	276,892,407,359	449,270,304,869	61.63	Tidak Efisien
2014	328,648,925,685	573,337,599,560	57.32	Tidak Efisien
2015	373,483,565,686	643,130,079,823	58.07	Tidak Efisien
2016	410,775,420,749	717,151,176,028	57.28	Tidak Efisien
Rata-rata	313,929,879,561	536,791,739,913	58.48	Tidak Efisien

Sumber: BKAD Kab. Sleman DIY, 2017 (data diolah)

Dari tabel 14 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Sleman di lima tahun terakhir tidak efisien. Jika di rinci lebih spesifikasi dengan melihat tingkat efisiensi di setiap tahunnya, rasio efisiensi pendapatan asli daerah yang menunjukkan kinerja terburuk Kabupaten Sleman berada di tahun anggaran 2013, dimana pada tahun anggaran tersebut rasio tingkat efisiensi pemerintah mencapai 61,63% dari total rata-rata rasio efisiensi di lima tahun terakhir atau berada pada tingkat di atas rata-rata. Sedangkan yang berada di bawah rata-rata tingkat efisiensi pendapatan yaitu pada tahun 2014 dan 2016 masing masing berada pada angka 57,32% dan 57,28%. Capaian ini menempatkan kinerja Kabupaten Sleman dengan predikat tidak efisien dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah.

SIMPULAN

Tren pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman selama periode lima tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016 telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25%. Dimana dari sumber-sumber PAD yang sangat

berkontribusi terhadap total PAD tersebut berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 59,11%. Tren pertumbuhan PAD Kabupaten Sleman selama periode tersebut memiliki proyeksi positif (trend positif). Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih sangat kecil masih dibawah 50% dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tergolong rendah berdasarkan rasio keuangan. Dimana rasio derajat desentralisasi berada dalam kategori sedang yaitu 26,34%. Rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dengan nilai rata-rata 67,78%. Rasio kemandirian keuangan daerah tergolong rendah atau menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan rata-rata 38,86%. Sementara untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dengan perolehan prosentase efektivitas sebesar 177,45% sedangkan untuk rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman tergolong dalam kategori tidak efisien karena perolehan prosentasi keefisienanan lebih dari 40% yaitu 58,48%.

Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Sesuai dengan hasil identifikasi potensi pendapatan asli daerah yang ada, maka dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peningkatan retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Helfert, Erich, D.D.A. 2000. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Ketujuh. Penerbit: Erlangga.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah. Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007.
- Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah). Jakarta: Salemba Empat.
- Koswara, E, 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, Analysis CSIS XXIX, No. 1.
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawir, Slamet. 2007. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: LAN RI.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Mendagri.
- Sleman Dalam Angka Tahun 2016
<http://bkad.slemankab.go.id>